

BAB II

LANDASAN TEORI DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

2.1. Teori Legitimasi (*Legitimacy Theory*)

Kondisi di mana struktur nilai organisasi yang mengadopsi dan merespons norma-norma sosial yang berkembang di lingkungan di mana perusahaan menjalankan aktivitasnya adalah definisi dari teori legitimasi (Dowling & Pfeffer, 1975). Teori legitimasi menjelaskan terkait perusahaan adalah komponen integral dari masyarakat, karenanya wajib menyesuaikan setiap tindakannya dengan norma dan aturan yang berlaku. Perusahaan secara berkelanjutan berupaya membuktikan bahwa aktivitasnya sesuai dengan batasan sosial dan regulasi yang ada. Legitimasi pada hakikatnya merupakan pengakuan masyarakat terhadap keberadaan perusahaan, yang dilandasi oleh konsep kontrak sosial antara keduanya. Hal ini berlangsung di wilayah di mana perusahaan menjalankan operasionalnya (Ghozali & Chariri, 2014). Teori legitimasi menekankan pentingnya penerimaan masyarakat terhadap aktivitas perusahaan. Pengakuan ini sangat kritis karena dapat secara signifikan memengaruhi kelangsungan hidup dan keberlanjutan organisasi.

Keterkaitan teori legitimasi dengan penelitian ini yakni, legalitas yang diinginkan perusahaan dalam menjalani proses bisnisnya dapat terjadi jika perusahaan dapat mengungkapkan lebih banyak informasi lingkungan sehingga menjaga hubungan baik dengan masyarakat. Kegagalan perusahaan dalam mengimplementasikan pengungkapan lingkungan secara komprehensif dapat merusak reputasi positif di hadapan publik, yang pada gilirannya akan membahayakan legitimasi dan eksistensi organisasi. Hal tersebut berkaitan dengan bagaimana perusahaan dapat mengungkapkan informasi lingkungan dalam

laporannya sehingga menunjukkan tanggung jawab perusahaan terhadap masyarakat dan menunjukkan citra yang positif terhadap masyarakat.

2.2. Teori Pemangku Kepentingan (*Stakeholder Theory*)

Dinamika hubungan antar individu atau kelompok yang saling memengaruhi dalam pencapaian tujuan organisasi merupakan definisi dari *stakeholder theory* (Freeman, 1984). Dalam menjalankan aktivitas operasional, perusahaan tidak semata-mata fokus pada kepentingan internal, melainkan wajib mempertimbangkan keuntungan bagi seluruh pihak terkait (Ghozali & Chariri, 2014). Para pemangku kepentingan membutuhkan informasi komprehensif untuk mendukung proses pengambilan keputusan, sehingga perusahaan perlu menyajikan informasi yang informatif dan menarik guna mengundang minat para investor.

Keterkaitan teori pemangku kepentingan dengan penelitian ini yakni, perusahaan harus menunjukkan komitmen yang tinggi dalam menjalin komunikasi efektif dan memenuhi berbagai kebutuhan strategis dari para pemangku kepentingan (Lukviarman, 2016). Salah satu cara memenuhi kebutuhan *stakeholder* adalah dengan memberikan informasi terkait dengan kegiatan perusahaan seperti lebih peduli terhadap isu lingkungan dengan melakukan pengungkapan lingkungan. *Environmental disclosure* menunjukkan adanya kepedulian perusahaan terhadap lingkungan sekitar tempat perusahaan beroperasi, dan hal ini mempengaruhi keberlanjutan perusahaan. Sehingga informasi seperti ini dapat meyakinkan *stakeholder* terhadap kelangsungan perusahaan, dan para pemangku kepentingan akan yakin untuk mengalokasikan modal mereka ke dalam perusahaan.

2.3. Pengungkapan

2.3.1. Definisi Pengungkapan

Pengungkapan (*disclosure*) adalah pemberian data atau informasi yang bermanfaat kepada pihak yang membutuhkan (Ghozali & Chariri, 2014). *Disclosure* atau pengungkapan merujuk pada prinsip keterbukaan informasi, yang berarti suatu entitas tidak boleh menyembunyikan atau merahasiakan informasi penting (Ghozali & Chariri, 2014). Salah satu bentuk utama pengungkapan perusahaan adalah melalui laporan tahunan, yang memiliki tanggung jawab untuk menghadirkan informasi yang transparan tentang hasil kegiatan operasional perusahaan. Dalam konteks ini, kualitas informasi sangat diutamakan, yakni harus disajikan dengan cara yang jelas, transparan, dan dapat dengan mudah dipahami oleh para pemangku kepentingan yang menggunakan laporan tersebut.

2.3.2. Konsep Pengungkapan

Konsep pengungkapan informasi dapat dibagi menjadi tiga kategori utama yang menjelaskan lingkup dan kedalaman informasi yang perlu disampaikan (Ghozali & Chariri, 2014).

1. Pengungkapan Cukup (*Adequate Disclosure*)

Pengungkapan ini merupakan tingkat pengungkapan minimal yang diperlukan agar laporan keuangan dapat berguna dan bermanfaat dalam proses *decisions making*. Artinya, informasi yang disampaikan harus memenuhi standar dasar yang memungkinkan pemahaman yang akurat tentang kondisi keuangan.

2. Pengungkapan Wajar (*Fair Disclosure*)

Konsep ini menekankan prinsip kesetaraan akses informasi. Konsep ini mensyaratkan bahwa semua pihak yang membutuhkan informasi harus mendapatkan akses yang sama dan seimbang terhadap informasi yang tersedia, tanpa ada diskriminasi atau pembatasan.

3. Pengungkapan Lengkap (*Full Disclosure*)

Tingkat yang paling komprehensif, di mana seluruh informasi yang relevan dan signifikan untuk pengambilan keputusan diungkapkan secara menyeluruh. Hal ini bertujuan memberikan transparansi penuh kepada para pengguna laporan.

2.3.3. Jenis Pengungkapan

Pengungkapan informasi oleh perusahaan terbagi menjadi dua kategori utama: pengungkapan wajib (*mandatory*) dan pengungkapan sukarela (*voluntary*). (Suwardjono, 2008). Pengungkapan wajib merujuk pada informasi yang diwajibkan untuk diungkapkan oleh perusahaan sesuai dengan regulasi pasar modal yang berlaku di suatu negara (Nuswandari, 2009). Sementara itu, pengungkapan sukarela adalah bentuk pengungkapan tambahan yang dilakukan perusahaan secara sukarela, di luar ketentuan wajib yang ada. Tujuan utama dari pengungkapan informasi adalah memberikan bantuan kepada pihak-pihak berkepentingan dalam proses pengambilan keputusan. Melalui pengungkapan sukarela, perusahaan tidak hanya sekadar memenuhi kewajiban hukum, melainkan juga menunjukkan kepedulian dan tanggung jawab sosialnya terhadap masyarakat. Salah satu contoh konkret dari pengungkapan yang dapat dilakukan perusahaan adalah *Environmental Disclosure* atau pengungkapan

lingkungan, di mana perusahaan dapat memberikan informasi terkait dampak dan upaya mereka terhadap lingkungan.

2.4. Environmental Disclosure

Environmental disclosure adalah suatu cara yang digunakan oleh perusahaan untuk menyampaikan informasi mengenai aktivitas operasionalnya serta dampaknya terhadap lingkungan sekitar (Ghozali & Chariri, 2014). Pengungkapan lingkungan menjadi penting untuk dilakukan perusahaan akibat dari dampak yang ditimbulkan perusahaan terhadap lingkungan sekitar perusahaan beroperasi (Ghozali & Chariri, 2014). Pengungkapan lingkungan merupakan proses pengungkapan informasi yang menggunakan berbagai model pelaporan terkait dengan praktik lingkungan yang dijalankan. Hal ini memungkinkan masyarakat untuk melakukan pemantauan terhadap kegiatan perusahaan dan menilai sejauh mana suatu perusahaan telah melaksanakan kewajibannya terhadap lingkungan (Ghozali & Chariri, 2014).

Perusahaan telah diwajibkan untuk menyampaikan laporan keberlanjutan tahunan sebagai bentuk transparansi dan tanggung jawab perusahaan yang telah terkandung dalam POJK No. 51 /POJK.03/2017 (Fathurohman et al., 2022). Selanjutnya pada Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas pasal 74 mewajibkan perusahaan yang menjalankan kegiatan operasionalnya di bidang sumber daya alam atau berkaitan dengan sumber daya alam untuk melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan, termasuk pengungkapan lingkungan. Pengungkapan lingkungan dapat berfungsi sebagai instrumen manajemen perusahaan untuk mencegah potensi konflik di bidang sosial

dan lingkungan, sekaligus menjadi bentuk pertanggungjawaban perusahaan terhadap masyarakat mengenai berbagai dampak dari kegiatan operasionalnya, baik yang bersifat negatif maupun positif (Maulia & Yanto, 2020).

2.5. Ukuran Dewan Komisaris

Salah satu bagian terpenting dalam perusahaan yang bertugas dalam hal *controlling* dan memberikan arahan kepada direksi agar terciptanya kegiatan operasional yang optimal adalah dewan komisaris (Daniri, 2005). Dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 dijelaskan bahwa dewan komisaris memiliki tugas untuk melakukan pengawasan atas segala kebijakan, pelaksanaan pengelolaan oleh direksi, serta memberikan nasihat direksi. Dewan komisaris memiliki tugas utama untuk mengawasi pelaksanaan kebijakan manajemen dan operasional perusahaan secara keseluruhan, baik yang berkaitan dengan aspek perusahaan maupun bisnis, serta memberikan arahan kepada direksi demi kepentingan perusahaan sesuai dengan visi dan tujuan yang telah ditetapkan (Suryarahman & Trihatmoko, 2021). Jumlah dewan komisaris yang semakin banyak, diasumsikan akan bertambah efektif pula pengawasan yang dilakukan terhadap manajemen dalam proses pengambilan keputusan strategis, termasuk keputusan yang berkaitan dengan pengungkapan lingkungan (*environmental disclosure*) (Maulia & Yanto, 2020).

2.6. Kepemilikan Institusional

Bagian kepemilikan saham perusahaan yang dimiliki oleh suatu lembaga disebut sebagai kepemilikan institusional (Lukviarman, 2016). Konsep tanggung jawab perusahaan saat ini telah berkembang melampaui kepentingan pemegang saham semata. Investor institusional memainkan peran strategis dalam mendorong

praktik keberlanjutan perusahaan. Mereka memiliki kapasitas yang signifikan untuk mendorong manajemen mengadopsi pengungkapan lingkungan yang lebih komprehensif. Adanya kepemilikan institusional yang tinggi dapat meningkatkan pengawasan institusional menjadi lebih baik (Fathurohman *et al.*, 2022). Pengawasan yang baik dari institusi akan mendorong pihak manajemen untuk menunjukkan kinerja yang lebih baik, dan hal ini juga dapat mencegah manajer dalam melakukan kegiatan *oportunistik* (Cahyaningsih *et al.*, 2022).

2.7. Profitabilitas

Profitabilitas adalah suatu indikator keuangan yang digunakan untuk mengevaluasi kemampuan perusahaan dalam menghasilkan keuntungan atau laba dalam periode tertentu (Kasmir, 2019). Profitabilitas merupakan rasio yang mengukur efektivitas perusahaan dalam mengelola sumber dayanya pada berbagai level, seperti penjualan, aset, dan modal (Munawir, 2006). Profitabilitas tidak hanya sekadar mengukur perolehan laba, tetapi juga mencerminkan efisiensi manajemen dalam mengelola sumber daya. Kemampuan ini berpotensi mendukung investasi perusahaan dalam praktik berkelanjutan dan pengungkapan lingkungan (Maulia & Yanto, 2020). Dapat disimpulkan bahwa profitabilitas merupakan rasio keuangan yang digunakan untuk menunjukkan sejauh mana perusahaan dapat memanfaatkan sumber daya untuk menghasilkan laba.

2.8. Penelitian Terdahulu

Penelitian pertama yang dilakukan oleh Wahyuningrum & Amalia (2023) dengan judul “Pengaruh Ukuran Perusahaan, Ukuran Dewan dan Struktur Kepemilikan Terhadap *Environmental Disclosure*” penelitian ini menggunakan

sampel sebanyak 112 dengan periode pengamatan satu tahun pada Perusahaan sektor energi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia, Bursa Malaysia, *Stock Exchange* Thailand, dan *Singapore Exchange* pada tahun 2019. Penelitian ini menggunakan ukuran perusahaan, ukuran dewan, kepemilikan asing, kepemilikan institusional, dan kepemilikan manajerial sebagai variabel independennya dan *environmental disclosure* sebagai variabel dependennya. Hasil penelitian menunjukkan ukuran perusahaan, ukuran dewan, dan kepemilikan asing, berpengaruh signifikan positif terhadap *environmental disclosure*, sedangkan kepemilikan institusional dan kepemilikan manajerial tidak berpengaruh terhadap *environmental disclosure*.

Penelitian kedua yang dilakukan oleh Fathurohman, *et al.* (2022) dengan judul “Pengaruh Profitabilitas, *Leverage*, Kepemilikan Publik dan Institusional Terhadap Pengungkapan Lingkungan” penelitian ini menggunakan sampel sebanyak 117 dengan periode pengamatan tiga tahun pada *customer non-cyclical* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia dalam periode 2018-2020. Penelitian ini menggunakan Profitabilitas, *leverage*, kepemilikan publik, dan kepemilikan Institusional sebagai variabel independennya dan *environmental disclosure* sebagai variabel dependennya. Hasil penelitian menunjukkan profitabilitas dan kepemilikan institusional tidak berpengaruh terhadap *environmental disclosure*, *leverage* memiliki pengaruh negatif terhadap *environmental disclosure*, sedangkan kepemilikan publik berpengaruh positif terhadap *environmental disclosure*.

Penelitian ketiga yang dilakukan oleh Maulana & Baroroh (2022) dengan judul “Pengaruh Tipe Industri, Ukuran Perusahaan, Profitabilitas, *Leverage* dan

Environmental Performance Terhadap Environmental Disclosure (Studi Empiris pada Perusahaan Peserta PROPER Tahun 2018-2020)” penelitian ini menggunakan sampel sebanyak 35 perusahaan dengan kurun waktu 3 tahun. Penelitian ini menggunakan tipe industri, ukuran perusahaan, profitabilitas, *leverage*, dan *environmental performance* sebagai variabel independennya dan *environmental disclosure* sebagai variabel dependennya. Hasil Penelitian menunjukkan bahwa tipe industri, ukuran perusahaan, profitabilitas, dan *environmental performance* mempunyai pengaruh terhadap *environmental disclosure*, sedangkan *leverage* tidak berpengaruh terhadap *environmental disclosure*.

Penelitian keempat yang dilakukan oleh Warmaningsih & Setiawan (2022) dengan judul “Pengaruh Sensitivitas Industri, Umur Perusahaan, dan Kinerja Lingkungan Terhadap *Environmental Disclosure* (Studi Empiris pada Perusahaan Manufaktur Terdaftar di BEI 2015-2019)” penelitian ini menggunakan sampel sebanyak 48 perusahaan dengan kurun waktu 5 tahun pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia 2019-2020. Penelitian ini menggunakan sensitivitas industri, umur perusahaan, dan kinerja lingkungan sebagai variabel independennya dan *environmental disclosure* sebagai variabel dependennya. Hasil Penelitian menunjukkan bahwa sensitivitas industri tidak memiliki pengaruh terhadap *environmental disclosure*, sedangkan umur perusahaan, dan kinerja lingkungan mempunyai pengaruh yang positif terhadap *environmental disclosure*.

Penelitian kelima yang dilakukan oleh Setiawan & Honesty (2022) dengan judul “Faktor-faktor yang mempengaruhi pengungkapan lingkungan” penelitian ini menggunakan sampel sebanyak 48 perusahaan dengan kurun waktu 5 tahun pada

perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia 2019-2020. Penelitian ini menggunakan sensitivitas industri, umur perusahaan, dan kinerja lingkungan sebagai variabel independennya dan *environmental disclosure* sebagai variabel dependennya. Hasil Penelitian menunjukkan bahwa sensitivitas industri, umur perusahaan, dan kinerja lingkungan mempunyai pengaruh yang positif terhadap *environmental disclosure*.

Penelitian keenam yang dilakukan oleh Cahyaningsih, *et al.* (2022) dengan judul “*The Role of Profitability in Weaking the Effect of Environmental Perfomance on Environmental Disclosure*” penelitian ini menggunakan 18 perusahaan dengan periode pengamatan tiga tahun pada Perusahaan sektor energi, barang mentah, dan barang konsumsi primer yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2019-2021. Penelitian ini menggunakan Kinerja lingkungan, kepemilikan institusional, dan profitabilitas sebagai variabel independennya dan *environmental disclosure* sebagai variabel dependennya. Hasil penelitian menunjukkan kinerja lingkungan, dan kepemilikan institusional berpengaruh positif, sedangkan profitabilitas tidak berpengaruh terhadap *environmental disclosure*.

Penelitian ketujuh yang dilakukan oleh Suryarahman & Trihatmoko (2021) dengan judul “*Effect Of Environmental Disclosure Performance and Boars Of Commissioners On Environmental Disclosures*” penelitian ini menggunakan sampel 100 perusahaan sektor pertambangan yang terdaftar di BEI tahun 2014-2018. Penelitian ini menggunakan kinerja lingkungan, ukuran dewan komisaris, komisaris independen, dan rapat dewan komisaris sebagai variabel independennya dan *environmental disclosure* sebagai variabel dependennya. Hasil penelitian

menunjukkan bahwa ukuran dewan komisaris dan rapat dewan komisaris berpengaruh terhadap *environmental disclosure*, sedangkan kinerja lingkungan dan komisaris independen tidak berpengaruh terhadap *environmental disclosure*.

Penelitian kedelapan yang dilakukan oleh Zullaekha & Susanto (2021) dengan judul “Pengaruh kepemilikan institusional, komite audit, profitabilitas, dan kinerja lingkungan terhadap *environmental disclosure* pada perusahaan manufaktur” penelitian ini menggunakan sampel 85 perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI tahun 2015-2019. Penelitian ini menggunakan kepemilikan institusional, komite audit, profitabilitas, dan kinerja lingkungan sebagai variabel independennya dan *environmental disclosure* sebagai variabel dependennya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kepemilikan institusional, dan komite audit tidak berpengaruh terhadap *environmental disclosure*, sedangkan profitabilitas dan kinerja lingkungan berpengaruh positif terhadap *environmental disclosure*.

Penelitian kesembilan yang dilakukan oleh Amelia & Trisnarningsih (2020) dengan judul “Pengaruh *Good Corporate Governance*, Profitabilitas, DAN Media Exposure Terhadap *Environmental Disclosure*” penelitian ini menggunakan 20 perusahaan yang terdaftar di BEI tahun 2015-2019. Penelitian ini menggunakan kepemilikan manajerial, kepemilikan institusional, komisaris independen, ukuran dewan komisaris, profitabilitas, dan *media exposure* sebagai variabel independennya dan *environmental disclosure* sebagai variabel dependennya. Hasil penelitian menunjukkan kepemilikan manajerial, komisaris independen, ukuran dewan komisaris, dan profitabilitas tidak memiliki pengaruh terhadap

environmental disclosure, sedangkan kepemilikan institusional dan *media exposure* berpengaruh positif terhadap *environmental disclosure*.

Penelitian terakhir yang dilakukan oleh Maulia & Yanto (2020) dengan judul “*The Determinants of Environmental Disclosure in Companies in Indonesia*” penelitian ini menggunakan sampel sebanyak 26 dengan periode pengamatan 5 tahun pada Perusahaan sektor pertanian, sektor industri barang konsumsi, dan Sektor industri dasar & kimia yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) 2014-2018. Penelitian ini menggunakan dewan komisaris, komite audit, sertifikasi lingkungan, profitabilitas, ukuran perusahaan, dan *leverage* sebagai variabel independennya dan *environmental disclosure* sebagai variabel dependennya. Hasil penelitian menunjukkan ukuran dewan komisaris, ukuran komite audit, sertifikasi lingkungan, profitabilitas dan ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap *environmental disclosure*, sedangkan *leverage* tidak berpengaruh terhadap *environmental disclosure*.

Tabel 2.1. Ringkasan Penelitian Terdahulu

No	Penelitian	Variabel	Subjek	Hasil
1.	(Wahyuningrum & Amalia, 2023)	Variabel Independen (X): Ukuran perusahaan, ukuran dewan, kepemilikan asing, kepemilikan institusional, dan kepemilikan manajerial Variabel Dependen (Y): <i>Environmental Disclosure</i>	Perusahaan sektor energi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia, Bursa Malaysia, <i>Stock Exchange</i> Thailand, dan <i>Singapore Exchange</i> pada tahun 2019.	1. Ukuran perusahaan memiliki pengaruh positif terhadap <i>environmental disclosure</i> . 2. Ukuran Dewan memiliki pengaruh positif terhadap <i>environmental disclosure</i> . 3. Kepemilikan Asing memiliki pengaruh positif terhadap <i>environmental disclosure</i> . 4. Kepemilikan Institusional tidak

				memiliki pengaruh terhadap <i>environmental disclosure</i> . 5. Kepemilikan Manajerial memiliki pengaruh negatif terhadap <i>environmental disclosure</i>
2.	(Fathurohman <i>et al.</i> , 2022)	Variabel Independen (X): Profitabilitas, <i>leverage</i> , kepemilikan publik, dan kepemilikan Institusional Variabel Dependen (Y): <i>Environmental Disclosure</i>	117 perusahaan <i>customer non-cyclical</i> yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia dalam periode 2018-2020.	1. Profitabilitas tidak memiliki pengaruh terhadap <i>environmental disclosure</i> . 2. <i>Leverage</i> memiliki pengaruh negatif terhadap <i>environmental disclosure</i> . 3. Kepemilikan Publik memiliki pengaruh positif terhadap <i>environmental disclosure</i> . 4. Kepemilikan Institusional tidak memiliki pengaruh terhadap <i>environmental disclosure</i> .
3.	(Maulana & Baroroh, 2022)	Variabel Independen (X): Tipe industri, ukuran perusahaan, profitabilitas, <i>leverage</i> , <i>environmental performance</i> Variabel Dependen (Y): pengungkapan lingkungan	35 perusahaan non-keuangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia dan menjadi peserta PROPER tahun periode 2018-2020.	1. Tipe industri berpengaruh positif terhadap <i>environmental disclosure</i> . 2. Ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap <i>environmental disclosure</i> . 3. profitabilitas berpengaruh positif terhadap <i>environmental disclosure</i> . 4. <i>Leverage</i> tidak berpengaruh terhadap <i>environmental disclosure</i> . 5. <i>Envirommental performance</i> berpengaruh positif terhadap

				<i>environmental disclosure.</i>
4.	(Wirmaningsih & Setiawan, 2022)	Variabel Independen (X): Sensitivitas industri, umur perusahaan, dan kinerja lingkungan Variabel Dependen (Y): pengungkapan lingkungan	48 perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2015-2019.	1. Sensitivitas industri tidak memiliki pengaruh terhadap <i>environmental disclosure.</i> 2. Umur perusahaan berpengaruh positif terhadap <i>environmental disclosure.</i> 3. Kinerja lingkungan berpengaruh positif terhadap <i>environmental disclosure.</i>
5.	(Setiawan & Honesty, 2022)	Variabel Independen (X): Sensitivitas industri, umur perusahaan, dan kinerja lingkungan Variabel Dependen (Y): <i>Environmental Disclosure</i>	Perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) 2016-2020.	1. Sensitivitas industri memiliki pengaruh positif terhadap <i>environmental disclosure.</i> 2. Umur perusahaan berpengaruh positif terhadap <i>environmental disclosure.</i> 3. Kinerja lingkungan berpengaruh positif terhadap <i>environmental disclosure.</i>
6.	(Cahyaningsih <i>et al.</i> , 2022)	Variabel Independen (X): Kinerja lingkungan, kepemilikan institusional, dan profitabilitas Variabel Dependen (Y): <i>Environmental Disclosure</i>	Perusahaan sektor energi, barang mentah, dan barang konsumsi primer yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2019-2021.	1. Kinerja lingkungan memiliki pengaruh positif terhadap <i>environmental disclosure.</i> 2. Kepemilikan Institusional memiliki pengaruh positif terhadap <i>environmental disclosure.</i> 3. Profitabilitas tidak berpengaruh terhadap <i>environmental disclosure.</i>
7.	(Suryarahman & Trihatmoko, 2021)	Variabel Independen (X): Kinerja lingkungan, ukuran dewan komisaris, komisaris independen,	100 perusahaan pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2014-2018.	1. Kinerja lingkungan tidak berpengaruh terhadap <i>environmental disclosure.</i> 2. Ukuran dewan komisaris berpengaruh positif

		jumlah rapat dewan komisaris Variabel Dependen (Y): <i>Environmental Disclosure</i>		terhadap <i>environmental disclosure</i> . 3. Komisaris independen tidak berpengaruh terhadap <i>environmental disclosure</i> . 4. Rapat dewan komisaris berpengaruh terhadap <i>environmental disclosure</i> .
8.	(Zullaekha & Susanto, 2021)	Variabel Independen (X): Kepemilikan Institusional, Komite Audit, Profitabilitas, dan Kinerja Lingkungan Variabel Dependen (Y): <i>Environmental Disclosure</i>	85 perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2015-2019.	1. Kepemilikan institusional tidak memiliki pengaruh terhadap <i>environmental disclosure</i> . 2. Komite audit tidak memiliki pengaruh terhadap <i>environmental disclosure</i> . 3. Profitabilitas memiliki pengaruh positif terhadap <i>environmental disclosure</i> . 4. Kinerja lingkungan memiliki pengaruh positif terhadap <i>environmental disclosure</i> .
9.	(Amelia & Trisnaningsih, 2020)	Variabel Independen (X): Kepemilikan manajerial, kepemilikan institusional, komisaris independen, ukuran dewan komisaris, profitabilitas, dan <i>media exposure</i> Variabel Dependen (Y): <i>Environmental Disclosure</i>	20 perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2015-2019.	1. Kepemilikan manajerial tidak berpengaruh terhadap <i>environmental disclosure</i> . 2. Kepemilikan institusional memiliki pengaruh positif terhadap <i>environmental disclosure</i> . 3. Komisaris independen tidak memiliki pengaruh terhadap <i>environmental disclosure</i> . 4. Ukuran dewan komisaris tidak memiliki pengaruh terhadap

				<i>environmental disclosure.</i> 5. Profitabilitas tidak memiliki pengaruh terhadap <i>environmental disclosure.</i> 6. <i>Media exposure Leverage</i> memiliki pengaruh positif terhadap <i>environmental disclosure.</i>
10.	(Maulia & Yanto, 2020)	Variabel Independen (X): Ukuran dewan komisaris, ukuran komite audit, sertifikasi lingkungan, profitabilitas, ukuran perusahaan, dan <i>leverage</i> Variabel Dependen (Y): <i>Environmental Disclosure</i>	26 perusahaan sektor pertanian, sektor industri barang konsumsi, dan Sektor industri dasar & kimia yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) 2014-2018.	1. Ukuran dewan komisaris berpengaruh positif terhadap <i>environmental disclosure.</i> 2. Ukuran komite audit berpengaruh positif terhadap <i>environmental disclosure.</i> 3. Sertifikasi lingkungan berpengaruh positif terhadap <i>environmental disclosure.</i> 4. Profitabilitas berpengaruh positif terhadap <i>environmental disclosure.</i> 5. Ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap <i>environmental disclosure.</i> 6. <i>Leverage</i> tidak berpengaruh terhadap <i>environmental disclosure.</i>

2.9. Pengembangan Hipotesis

2.9.1. Pengaruh Ukuran dewan Komisaris Terhadap *Environmental Disclosure*

Semakin banyak anggota dewan komisaris dalam suatu perusahaan, semakin besar kemungkinan untuk meningkatkan kualitas dan keberhasilan pengungkapan informasi terkait lingkungan. Hal ini disebabkan oleh kemampuan dewan komisaris dengan jumlah anggota yang lebih banyak untuk menghasilkan berbagai ide, perspektif, dan pemahaman yang lebih komprehensif, yang pada gilirannya dapat mengoptimalkan proses pengungkapan lingkungan oleh manajemen perusahaan. Merujuk pada teori pemangku kepentingan (*stakeholder theory*), perusahaan bertanggung jawab untuk menghadirkan dan mengomunikasikan informasi yang relevan bagi seluruh pihak berkepentingan (Masida & Yoseph, 2024). Dalam konteks tersebut, pemangku kepentingan umumnya menunjukkan ketertarikan yang lebih besar terhadap perusahaan dengan dewan komisaris yang memiliki ukuran lebih besar. Hal ini dikarenakan struktur yang lebih luas dianggap melakukan kemampuan pemantauan dan pengawasan yang lebih terhadap kegiatan operasional perusahaan, termasuk dalam hal pengungkapan lingkungan. Dewan komisaris juga memastikan bahwa pengungkapan lingkungan sesuai dengan ekspektasi pemangku kepentingan. Selain itu dalam kaitannya dengan teori legitimasi, dewan komisaris dapat memonitor kesenjangan antara operasi perusahaan dengan norma sosial, dan memastikan perusahaan menjalankan kegiatan yang selaras dengan norma sosial masyarakat. Banyaknya anggota dewan komisaris dapat melakukan pemantauan yang lebih maksimal terhadap

manajemen untuk terus membangun hubungan dan citra yang baik dengan masyarakat, sehingga pengungkapan lingkungan dapat dimaksimalkan sebagai bentuk tanggung jawab perusahaan (Sembiring & Tambunan, 2021).

Penelitian yang dilakukan oleh Suryarahman & Trihatmoko (2021) dan Maulia & Yanto (2020) menghasilkan temuan pengaruh positif terkait hubungan antara ukuran dewan komisaris dan pengungkapan lingkungan (*environmental disclosure*). Kedua studi tersebut menyimpulkan bahwa terdapat pengaruh positif antara jumlah anggota dewan komisaris dengan kualitas pengungkapan lingkungan perusahaan. Semakin besar ukuran dewan komisaris dalam suatu perusahaan, semakin meningkat pula kemampuan perusahaan untuk melakukan pengungkapan lingkungan. Hal ini disebabkan oleh mekanisme pengawasan yang lebih ketat dan komprehensif yang dilakukan oleh dewan komisaris. Anggota dewan komisaris memiliki tanggung jawab kunci dalam memastikan bahwa aktivitas operasional perusahaan berjalan dengan baik dan sesuai dengan standar yang berlaku. Sedangkan penelitian oleh Wahyuningrum & Amalia (2023) serta Amalia & Trisnarningsih (2021) menyatakan ukuran dewan komisaris tidak memiliki pengaruh terhadap *environmental disclosure*.

Berdasarkan hasil penelitian sebelumnya yang tidak konsisten mengenai pengaruh kepemilikan institusional terhadap pengungkapan lingkungan. Maka dalam penelitian ini peneliti menggunakan dasar teoritis sebagai pengembangan hipotesis. Oleh sebab itu, penelitian ini akan mengajukan hipotesis, yakni:

H1 = Ukuran Dewan Komisaris berpengaruh positif terhadap *Environmental Disclosure*

2.9.2. Pengaruh Kepemilikan Institusional Terhadap *Environmental Disclosure*

Kepemilikan institusional dapat melakukan pengawasan terhadap manajemen (Fathurohman *et al.*, 2022). Perusahaan bisa lebih memperhatikan lingkungan sosialnya dengan cara melaporkan pengungkapan lingkungan dalam laporan keuangannya, agar dapat memenuhi harapan para pemangku kepentingan. Perspektif teori pemangku kepentingan menegaskan bahwa perusahaan memiliki tanggung jawab untuk menjaga hubungannya dengan investor baik dalam bidang sosial, ekonomi, maupun lingkungan (Wahyuningrum & Amalia, 2023). Ketika tingkat kepemilikan institusional semakin besar, para investor institusional memiliki kapasitas untuk memengaruhi kebijakan perusahaan, yang pada gilirannya dapat mendorong perusahaan untuk meningkatkan transparansi pengungkapan lingkungan sebagai bentuk pertanggungjawaban sosial kepada lembaga dan publik yang lebih luas seperti masyarakat dan lingkungan (Cahyaningsih *et al.*, 2022).

Penelitian oleh Cahyaningsih, *et al.*, (2022) Amalia & Trisnaningsih (2021) menyatakan kepemilikan institusional berpengaruh positif. Sedangkan penelitian oleh Wahyuningrum & Amalia (2023), Fathurohman *et al.*, (2022) dan Zullaekha & Susanto (2021) menyatakan kepemilikan institusional tidak berpengaruh terhadap pengungkapan lingkungan.

Berdasarkan teori dan hasil penelitian sebelumnya yang tidak konsisten mengenai pengaruh kepemilikan institusional terhadap pengungkapan lingkungan. Maka dalam penelitian ini peneliti menggunakan dasar teoritis

sebagai pengembangan hipotesis. Oleh karena itu, penelitian ini akan mengajukan hipotesis, yakni:

H2 = Kepemilikan Institusional berpengaruh positif terhadap *Environmental Disclosure*

2.9.3. Pengaruh Profitabilitas Terhadap *Environmental Disclosure*

Perusahaan yang memiliki tingkat keuntungan yang tinggi menunjukkan perusahaan dapat menghasilkan dana yang lebih banyak. Hal ini akan mendorong perusahaan untuk melakukan pengungkapan lingkungan. Perusahaan yang mampu meraih laba akan lebih mudah untuk menerbitkan pengungkapan lingkungan agar perusahaan mendapatkan legitimasi dari masyarakat dan citra yang positif dari masyarakat (Maulia & Yanto, 2020). Ini karena perusahaan dengan tingkat keuntungan yang tinggi menunjukkan perusahaan memiliki kemampuan dalam hal kinerja yang lebih baik, yang selanjutnya memungkinkan mereka untuk dengan lebih mudah mengimplementasikan dan mengkomunikasikan inisiatif pengungkapan lingkungan. Dalam teori pemangku kepentingan perusahaan dengan tingkat profitabilitas yang lebih tinggi merasa memiliki tanggung jawab yang lebih besar untuk melakukan praktik pengungkapan lingkungan, sebagai respons terhadap tuntutan berbagai *stakeholder* (Zullaekha & Susanto, 2021).

Berdasarkan hasil penelitian sebelumnya oleh Cahyaningsih, *et al.*, (2022), Fathurohman *et al.*, (2022), dan Amalia & Trisnaningsih (2021) menyatakan bahwa profitabilitas tidak memiliki pengaruh terhadap pengungkapan lingkungan. Sementara itu, penelitian yang dilakukan Zullaekha & Susanto

(2021), Maulana & Baroroh (2020) dan Maulia & Yanto (2020) menyatakan bahwa profitabilitas berpengaruh positif terhadap pengungkapan lingkungan.

Berdasarkan hasil penelitian sebelumnya yang tidak konsisten dalam membahas hubungan profitabilitas terhadap pengungkapan lingkungan. Maka dalam penelitian ini peneliti menggunakan dasar teoritis sebagai pengembangan hipotesis. Oleh sebab itu, penelitian ini akan mengajukan hipotesis, yakni:

H3 = Profitabilitas berpengaruh positif terhadap *Environmental Disclosure*

